

**PENANGKAPAN ANAK-ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI
AFGHANISTAN DENGAN TUDUHAN SEBAGAI *ENEMY COMBATANT*
(SUATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL)**

Nickita Herzegovina Sumantri, Herman Suryokumoro SH., MS., Sucipto SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: nickitasumantri@hotmail.com

Abstrak

Penangkapan anak-anak sebagai *enemy combatant* merupakan hal yang baru dalam dunia internasional. Status *enemy combatant* yang bukan merupakan istilah hukum dan belum diakui dalam hukum humaniter internasional menimbulkan polemik tersendiri ketika seseorang ditangkap di tengah konflik bersenjata dengan tuduhan sebagai *enemy combatant*. Apalagi, alasan penangkapan tersebut adalah untuk mencegah kombatan kembali ke dalam medan perang dan melakukan perlawanan.

Artikel ini akan membahas bagaimana penangkapan anak-anak Afghanistan dengan tuduhan sebagai *enemy combatant* oleh Amerika Serikat dilihat dari hukum humaniter internasional. Artikel ini juga akan membahas tentang perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak-anak Afghanistan yang ditangkap tersebut.

Kata kunci: Penangkapan, anak, konflik bersenjata, *enemy combatant*

Abstract

The arrest of children as enemy combatant is a new thing in the world. The status of enemy combatant is not a legal term and it is not yet recognized in international humanitarian law which rise to polemics when a person is arrested in the middle of an armed conflict with charges as enemy combatant. Moreover, the reason for the arrest is to prevent combatants back into the battlefield.

This article will discuss about how the Afghan children who were arrested in Afghanistan as an enemy combatant by the United States viewed by the international humanitarian law. This article will also discuss about the legal protection that should be given to the Afghan children who were arrested.

Keywords: arrest, children, armed conflict, enemy combatant

A. Pendahuluan

Konflik bersenjata (*armed conflict*) merupakan sebuah isu nasional maupun internasional yang sudah lama terjadi dan masih terjadi hingga saat ini. Konflik bersenjata telah terjadi sejak zaman prasejarah, di mana manusia belum mengenal tulisan. Konflik bersenjata pada

zaman prasejarah, pada zaman sebelum masehi, memiliki perbedaan dengan konflik bersenjata di zaman modern ini. Seperti pada sistem dan cara melakukan perlawanan hingga perlindungan terhadap pihak-pihak yang ikut maupun tidak ikut konflik. Namun, ada kesamaan antara konflik bersenjata yang terjadi pada zaman dahulu dengan perang yang terjadi sekarang, konflik bersenjata cenderung menimbulkan kekacauan dan kehancuran pada kehidupan umat manusia, baik terhadap kombatan maupun non-kombatan, seiring berjalannya waktu.

Dalam konflik bersenjata, penduduk dari suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilians*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.¹ Kombatan dan penduduk sipil, dalam hukum humaniter internasional, harus dibedakan agar tidak terjadi pelanggaran ketika terjadi konflik bersenjata. Penduduk sipil, yang tidak ikut andil dalam konflik, harus dilindungi dari serangan musuh atau kombatan dan tidak boleh dijadikan sasaran konflik. Sebaliknya, kombatan tidak boleh menyerang penduduk sipil dalam konflik. Pembedaan kombatan dan penduduk sipil tersebut disebut dengan prinsip pembedaan (*distinction principle*)².

Walaupun pembedaan terhadap kombatan dengan penduduk sipil sangatlah penting, perlindungan terhadap keduanya juga tidak kalah penting. Dalam konflik bersenjata, baik kombatan maupun penduduk sipil tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Perlindungan terhadap kombatan, khususnya mereka yang telah jatuh ke tangan musuh atau tawanan perang, diatur dalam Konvensi Jenewa III (*The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*), sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa IV (*The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Dalam suatu konflik bersenjata, adanya anak-anak di tengah-tengah konflik bukanlah hal yang jarang atau asing. Anak-anak selalu ada di tengah konflik bersenjata. Perlindungan terhadap mereka sangatlah dibutuhkan, mengingat usia mereka yang masih muda dan

¹ Arlina Permanasari, **Pengantar Hukum Humaniter**, ICRC, Jakarta, 1999, hlm 73. Dikutip dari Haryomataram, **Hukum Humaniter**, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 63. Sedangkan Jean Pictet menggunakan istilah *Non-combatant* untuk *Civilian*; lihat Jean Pictet, **Development and Principles of International Humanitarian Law**, Martinus Nijhoff-Henry Dunant Institute, 1985, hlm. 72.

² Menurut Jean Pictet dalam buku Arlina Permanasari dan kawan-kawan, **Pengantar Hukum Humaniter**, ICRC, Jakarta, 1999 hlm 74, prinsip pembedaan berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan, '*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*'.

mereka masih harus mendapatkan perawatan, perlindungan, dan kasih sayang yang lebih dari keluarga dan orang di sekitarnya.

Pasal 24 Konvensi Jenewa IV menjamin bahwa pihak-pihak yang bertikai akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk anak-anak di bawah lima belas tahun, anak-anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena perang, untuk tidak akan dibiarkan sendiri. Anak-anak tersebut juga akan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan dalam pelaksanaan ibadah dan pendidikan. Konvensi ini menjamin bahwa anak-anak akan tetap dilindungi dalam konflik bersenjata.

Pihak-pihak dalam pertikaian selanjutnya harus membantu usaha penempatan anak-anak demikian di negara netral selama berlangsungnya pertikaian, dan harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu agar semua anak di bawah 12 tahun diberi tanda-tanda identitas (cakram pengenalan dan sebagainya) seperlunya.³

Perlakuan khusus terhadap anak-anak juga diatur dalam pasal 77 Protokol I. Menurut Protokol I, anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka, mereka tidak boleh didaftarkan menjadi anggota angkatan perang sebelum berusia 15 tahun, dan jika sebelum usia tersebut mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila tertangkap, mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka, dan terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman mati.⁴

Perlindungan terhadap anak-anak di tengah konflik bersenjata juga diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*. Pasal 8 *Declaration of the Rights of the Child* menyatakan bahwa "*The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief*". Hal ini berarti, anak adalah prioritas utama. Anak harus mendapatkan perlindungan dan bantuan. Hal ini tetap berlaku terhadap anak-anak yang hidup dan tinggal di tengah konflik bersenjata, bahwa anak-anak tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan.

Meskipun anak-anak telah diberi perlindungan agar tetap menjalankan hidupnya dengan baik, walaupun di tengah konflik bersenjata, pada nyatanya masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan secara penuh. Salah satu contoh kasus yang merupakan pelanggaran atas hak-hak anak adalah penangkapan lebih dari 200 anak dan remaja Afghanistan oleh Amerika Serikat sejak tahun 2008 sebagai *enemy combatant*.

³ Mochtar Kusumaatmadja, **Konvensi-konvensi Palang Merah th. 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang**, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979, hlm 88.

⁴ Arlina Permanasari, Op Cit, hlm 172.

Amerika Serikat telah menangkap lebih dari 200 anak Afghanistan dan dipenjarakan di penjara militer Amerika Serikat di Afghanistan. Dalam laporan di *United Nations on the Rights of the Child*, Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Amerika Serikat telah menangkap lebih dari 200 individu dengan usia di bawah 18 tahun dan menahan mereka di *Detention Facility in Parwan* (DFIP). Rata-rata usia 200 lebih individu yang ditangkap tersebut adalah 16 tahun. Beberapa dari mereka tetap ditahan di DFIP dan beberapa dari mereka telah dibebaskan atau ditransfer ke pemerintah Afghanistan.

Amerika Serikat, dalam laporannya tersebut, mengatakan bahwa alasan penangkapan anak-anak Afghanistan itu adalah untuk mencegah kombatan kembali ke medan perang. Amerika Serikat mengatakan bahwa alasan penangkapannya merupakan pencegahan agar kombatan tidak kembali ke medan perang, bukan untuk menghukum anak-anak Afghanistan tersebut. Anak-anak tersebut juga ditangkap sebagai *enemy combatant*, padahal, ketika ditangkap, anak-anak tersebut tidak sedang mengangkat senjata, tidak memakai seragam kombatan, atau bahkan ikut serta dalam perang.

Dalam laporan di *United Nations on the Rights of the Child*, Amerika menuliskan bahwa, "*in the conflict between the United States and Al Qaida, Taliban, and associated forces, the law of armed conflict permits the United States to detain belligerents until the end of hostilities without charging such individuals with crimes, because they are not being held as criminals facing future criminal trial*".

Amerika Serikat, dalam laporan di *United Nations on the Rights of the Child*, juga menuliskan bahwa, "*in detaining juvenile combatants, the United States seeks to restore some hope for their future and to prepare them for reintegration into society*". Amerika Serikat mengatakan bahwa penangkapan anak-anak Afghanistan tersebut juga merupakan suatu upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk melindungi dan memberikan harapan kepada anak-anak tersebut yang telah hidup dalam lingkungan konflik bersenjata. Namun, apabila Amerika Serikat memang ingin memberikan perlindungan terhadap mereka, haruskah perlindungan tersebut dilakukan dengan menangkap mereka dan memasukkan mereka dalam penjara militer serta menggolongkan mereka sebagai *enemy combatant*?

Penangkapan lebih dari 200 anak Afghanistan sejak tahun 2008 sudah jelas merupakan bentuk rasa kegelisahan Amerika Serikat akan tragedi 11 September dua belas tahun silam. Walaupun Amerika Serikat telah menghapuskan kekuasaan Taliban, namun Amerika Serikat masih tetap melakukan perang dan melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan dan mencegah tindak terorisme. Salah satu contohnya adalah penangkapan

terhadap lebih dari 200 anak Afghanistan dan memberi mereka label sebagai *enemy combatant*.

Enemy combatant sendiri merupakan suatu istilah yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk memberi cap bahwa seseorang merupakan teroris atau simpatisan dari group teroris. Apabila dilihat dari kasus penangkapan 200 anak Afghanistan sebagai *enemy combatant* ini, anak-anak tersebut bukanlah teroris atau simpatisan group teroris. Anak-anak tersebut ditangkap di tengah konflik bersenjata yang tengah terjadi di Afghanistan.

B. Isu Hukum

1. Apakah perbuatan Amerika Serikat menangkap anak-anak Afghanistan dengan tuduhan sebagai *enemy combatant* dibenarkan oleh hukum humaniter internasional?
2. Apakah anak-anak Afghanistan yang ditangkap Amerika Serikat sebagai *enemy combatant* berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hukum humaniter internasional?

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif disini dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu masalah penangkapan anak-anak dalam konflik bersenjata di Afghanistan dengan tuduhan sebagai Enemy Combatant, dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan, perjanjian internasional, doktrin-doktrin, teori-teori hukum pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan “*statuta approach*”⁵, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum di bidang hukum humaniter. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *case approach* untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan Amerika merupakan perbuatan hukum yang dibenarkan oleh hukum humaniter internasional dan perlindungan seperti apa yang seharusnya diberikan terhadap anak-anak Afghanistan yang ditangkap Amerika Serikat sebagai *enemy combatant*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah *The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (Konvensi Jenewa

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93.

IV), *Protocol I (1977) relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* (Protokol Tambahan I), *Protocol II (1977) relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts* (Protokol Tambahan II), *Convention on the Rights of the Child* (CRC), *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan artikel dalam website, juga berita-berita yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus hukum.

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif.

1. Penangkapan Anak-anak Afghanistan oleh Amerika Serikat dengan Tuduhan sebagai *Enemy Combatant* dilihat dari Hukum Humaniter Internasional

Istilah *enemy combatant* merupakan istilah yang digunakan Amerika Serikat untuk mengkategorikan setiap orang yang dianggap memiliki keterlibatan dengan Afghanistan atau bahkan al Qaeda, bisa merupakan anggota jaringan teroris, dan yang jelas setiap orang yang dikategorikan sebagai *enemy combatant* dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara Amerika Serikat. Bukan hanya warga negara Afghanistan yang dapat dikategorikan sebagai *enemy combatant*, warga Amerika Serikat sendiri pun apabila dianggap mengancam keamanan negara, dapat ditangkap dan diadili sebagai *enemy combatant*. Namun, istilah ini hanya digunakan oleh Amerika Serikat dan belum ada definisi resmi dari *enemy combatant* dalam hukum internasional ataupun hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional belum mengatur tentang status *enemy combatant* di dalam sebuah konflik bersenjata. Belum ada peraturan yang menjelaskan tentang status *enemy combatant* dan apakah *enemy combatant* termasuk dalam golongan kombatan atau penduduk sipil. Namun, apabila dilihat dari beberapa pengertian tentang *enemy combatant*, *enemy combatant* dianggap sebagai bagian dari *unlawful combatant*.

Istilah *unlawful combatant*, seperti halnya *enemy combatant*, tidak didefinisikan secara langsung dalam perjanjian internasional dalam hukum humaniter internasional. Penggunaan istilah tersebut sudah lama digunakan baik dalam literatur hukum, di kalangan militer, dan dalam kasus-kasus hukum.

Unlawful combatant dipahami sebagai sebuah istilah untuk menggambarkan orang-orang yang mengambil bagian langsung dalam permusuhan padahal mereka tidak memiliki hak untuk turut dalam permusuhan. Sehingga mereka tidak dapat diklasifikasikan sebagai tawanan perang ketika mereka jatuh ke tangan musuh. Contoh dari orang-orang yang dapat disebut sebagai *unlawful combatant* adalah penduduk sipil serta anggota milisi dan korps relawan yang turut serta dalam pertempuran.

Unlawful combatant tidak dapat dilindungi dalam Konvensi Jenewa I-III. Pihak yang disebut sebagai *unlawful combatant* juga tidak dapat diperlakukan dan dilindungi layaknya seorang tawanan perang. Karena pada dasarnya mereka yang disebut sebagai *unlawful combatant* tidak memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam konflik bersenjata yang terjadi. Hal itu dikarenakan mereka bukanlah pasukan militer melainkan penduduk sipil. Namun, *unlawful combatant* tetap mendapatkan perlindungan dalam hukum humaniter internasional yaitu dalam Konvensi Jenewa IV.

Pasal 5 dari Konvensi Jenewa IV menyatakan, bahwa:

Where, in the territory of a Party to the conflict, the latter is satisfied that an individual protected person is definitely suspected of or engaged in activities hostile to the security of the State, such individual person shall not be entitled to claim such rights and privileges under the present Convention as would, if exercised in the favour of such individual person, be prejudicial to the security of such State.

Where in occupied territory an individual protected person is detained as a spy or saboteur, or as a person under definite suspicion of activity hostile to the security of the Occupying Power, such person shall, in those cases where absolute military security so requires, be regarded as having forfeited rights of communication under the present Convention.

In each case, such persons shall nevertheless be treated with humanity, and in case of trial, shall not be deprived of the rights of fair and regular trial prescribed by the present Convention. They shall also be granted the full rights and privileges of a protected person under the present Convention at the earliest date consistent with the security of the State or Occupying Power, as the case may be.

Pasal 5 Konvensi Jenewa IV memungkinkan adanya derogasi, di bawah kondisi tertentu, bahwa perlindungan dalam konvensi ini dengan menggunakan istilah "*protected person*" atau orang yang dilindungi juga berkaitan dengan orang yang ditahan sebagai mata-mata atau penyabotase serta orang-orang yang dicurigai atau terlibat dalam kegiatan permusuhan dengan keamanan negara atau suatu kegiatan pendudukan. Kedua konsep dalam pasal 5 Konvensi Jenewa IV ini, kegiatan permusuhan dengan keamanan negara

atau suatu kegiatan pendudukan dan sabotase⁶ tentu saja meliputi partisipasi langsung (tanpa adanya hak untuk itu) dalam permusuhan. Dengan demikian, pasal ini akan berlaku terutama bagi orang-orang yang tidak memenuhi kriteria Konvensi Jenewa I-III dan mengambil bagian langsung dalam permusuhan, yaitu orang-orang yang disebut sebagai *unlawful combatant*.⁷

Pasal 45 ayat (3) Protokol Tambahan I juga memberikan pemaparan bahwa *unlawful combatant* dilindungi di bawah Konvensi Jenewa IV. Secara implisit dikatakan bahwa *unlawful combatant* dilindungi dalam Konvensi Jenewa IV dan juga ketentuan dalam Protokol Tambahan I. *Unlawful combatant* yang berada di daerah yang sedang diokupasi, termasuk juga orang-orang yang dilindungi yang turut serta dalam permusuhan di wilayah yang sedang diokupasi dan tidak memiliki status sebagai tawanan perang, juga menjadi objek yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa IV.

Mengacu pada kasus penangkapan anak-anak Afghanistan oleh Amerika Serikat sebagai *enemy combatant* dapat disimpulkan bahwa status *enemy combatant* bukanlah bagian dari *unlawful combatant*. Penangkapan terhadap anak-anak tersebut juga tidak bisa disamakan dengan penangkapan *unlawful combatant*, melainkan penangkapan terhadap penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan.

Dalam kasus penangkapan anak-anak Afghanistan oleh Amerika Serikat sebagai *enemy combatant*, anak-anak tersebut berstatus sebagai penduduk sipil. Hal ini sama dengan kedudukan *unlawful combatant*, di mana salah satu kategori orang yang dapat disebut sebagai *unlawful combatant* adalah penduduk sipil yang tidak memiliki hak untuk turut serta mengambil bagian dalam konflik bersenjata tetapi mereka melakukannya. Namun, perbedaannya terletak pada fakta bahwa anak-anak yang ditangkap Amerika Serikat tidak turut serta dalam konflik bersenjata yang sedang terjadi. Jadi status anak-anak tersebut murni sebagai penduduk sipil dan bukan *unlawful combatant*.

Selain itu, keadaan anak-anak yang ditangkap Amerika Serikat juga tidak memenuhi persyaratan yang diberika oleh pasal 5 Konvensi Jenewa IV. Anak-anak tersebut tidak terlibat dalam kegiatan permusuhan dengan keamanan negara, dalam hal ini

⁶ Dörmann, Knut, *The Legal Situation of "Unlawful/ Unprivileged Combatants"*, International Review of the Red Cross No. 849, 2003, hlm. 50. Lihat juga E. Rosenblad, "Guerrilla warfare and international law". *Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre*, 1973, pp. 110 et seq. Rosenblad further states : "A saboteur, who is [sic] unlawful combatant, is on the one hand punished in accordance with the Civilians Convention. Granted that he is a "protected person" (Article 4) and that in this capacity he shall be unconditionally "treated with humanity" (third paragraph of Article 5). A protected person can, however, if 'imperative reasons of security' make this necessary, be subjected to assigned residence or to internment (Article 78). Furthermore, the Occupying Power can under certain circumstances retain a saboteur without judgement (second paragraph of Article 5) and, in the case of prosecution, sentence him to death (second paragraph of Article 68)."

⁷ Ibid.

Amerika Serikat. Anak-anak tersebut juga tidak terlibat dalam kegiatan pendudukan atau kegiatan lain yang mengancam keamanan negara Amerika Serikat. Walaupun salah satu alasan mengapa anak-anak tersebut ditangkap adalah untuk mencegah kembalinya kombatan masuk kembali dalam konflik, namun anak-anak ini tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Penangkapan anak-anak Afghanistan sebagai *enemy combatant* oleh Amerika Serikat tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Karena istilah *enemy combatant* sendiri bukanlah suatu istilah yang digunakan dan diatur dalam hukum humaniter internasional. Walaupun Amerika Serikat juga menyamakan kedudukan *unlawful combatant* dengan *enemy combatant*, namun dalam kasus ini anak-anak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai *unlawful combatant*.

Dalam laporan yang ditulis Amerika Serikat kepada *UN's Committee on the Rights of the Child*, mengenai alasan mengapa Amerika menangkap anak-anak Afghanistan dan apa saja tuntutan yang diberikan, Amerika Serikat menyatakan bahwa penangkapan tersebut untuk mencegah kombatan kembali lagi ke dalam medan perang dan melanjutkan pertempuran. Disebutkan juga, bahwa hukum perang mengizinkan Amerika Serikat untuk menangkap pihak-pihak yang berperang hingga pertempuran yang terjadi selesai tanpa menuntut mereka dengan suatu tindak kejahatan, karena pada dasarnya mereka tidak ditangkap untuk selanjutnya dihadapkan pada persidangan. Penangkapan anak-anak tersebut sebagai *enemy combatant* berarti bahwa anak-anak tersebut juga dianggap mengancam keamanan Amerika Serikat dan juga bahwa anak-anak tersebut memiliki keterlibatan dengan jaringan teroris al-Qaeda.

Amerika Serikat menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perang atau hukum humaniter internasional. Ketentuan yang dimaksud tidak dijelaskan dalam laporan yang diberikan kepada *UN's Committee on the Rights of the Child*. Tetapi, Ryan Goodman dalam *The Detention of Civilians in Armed Conflict*, menyebutkan bahwa pasal 5, 27, 41-43, dan 78 Konvensi Jenewa IV mengizinkan penangkapan penduduk sipil apabila mereka dianggap mengancam keamanan negara. Pasal-pasal tersebut merupakan dasar mengapa Amerika Serikat telah menangkap penduduk sipil yang mereka anggap sebagai *enemy combatant* karena mereka dianggap mengancam keamanan negara.

Pasal 5 dari Konvensi Jenewa IV, menyatakan bahwa penduduk sipil yang dicurigai atau terlibat dalam kegiatan permusuhan dengan keamanan negara atau suatu kegiatan pendudukan dapat ditangkap. Pada penjelasan di atas, yang dimaksud dengan

penduduk sipil adalah termasuk *unlawful combatant* dan penduduk sipil yang ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Walaupun begitu, terdapat suatu frasa yaitu ". . . *definitely suspected*". Frasa ini dimaksudkan apabila penduduk sipil diduga melakukan kegiatan permusuhan dengan keamanan negara atau melakukan kegiatan pendudukan dapat pula ditangkap. Dalam *Commentary of Geneva Convention IV*, dijelaskan bahwa frasa tersebut berasal dari bahasa Perancis yaitu "*d'une suspicion légitime*". Arti dari kalimat tersebut adalah harus ada kecurigaan yang pasti, atau dalam bahasa Inggrisnya, *the suspicion must be a definite one*. Secara lengkapnya, menurut Jean S. Pictet dalam *commentary* tersebut, harus ada keterlibatan seseorang yang bersangkutan secara pribadi. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, bagaimana pihak yang berwenang dapat memiliki alasan yang serius untuk mempertimbangkan bahwa seseorang merupakan obyek kecurigaan yang sah.

Meskipun belum jelas bagaimana suatu alasan kecurigaan itu benar-benar sesuai dengan hukum humaniter internasional, pasal ini dianggap dapat memperbolehkan pihak-pihak yang diduga akan mengancam keamanan negara dapat ditangkap. Amerika Serikat menganggap bahwa *enemy combatant* adalah pihak yang akan mengancam keamanan negaranya, sehingga dengan berdasar pada pasal ini Amerika melakukan penangkapan terhadap penduduk anak-anak yang mereka anggap akan memberikan ancaman terhadap keamanan negaranya. Padahal, Amerika tidak memiliki bukti yang kuat yang dapat memperlihatkan apabila anak-anak Afghanistan yang ditangkap akan menjadi ancaman untuk keamanan negaranya.

Pasal 27 Konvensi Jenewa IV juga dianggap mengizinkan penangkapan penduduk sipil apabila mereka dianggap mengancam keamanan negara. Pasal 27 berbunyi:

Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity.

Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.

Without prejudice to the provisions relating to their state of health, age and sex, all protected persons shall be treated with the same consideration by the Party to the conflict in whose power they are, without any adverse distinction based, in particular, on race, religion or political opinion.

However, the Parties to the conflict may take such measures of control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war.

Paragraf terakhir pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak dalam konflik dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam hal pengamanan, terhadap orang-orang yang dilindungi menurut konvensi ini, selama hal tersebut diperlukan karena adanya perang yang terjadi.

Penangkapan *enemy combatant*, menurut Amerika Serikat, diperbolehkan selama seseorang yang dinyatakan sebagai *enemy combatant* tersebut mengancam keamanan negara sehingga diperlukan adanya langkah pencegahan agar tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan terjadi. Namun, bila dihubungkan dengan kasus penangkapan anak-anak Afghanistan ini, anak-anak tersebut tidak melakukan hal apapun yang dapat mengancam keamanan negara. Direktur Eksekutif International Justice Network menyebutkan bahwa ketika ditangkap, anak-anak tersebut tidak mengenakan seragam seperti yang dikenakan kombatan. Anak-anak itu murni sebagai penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam peperangan. Sehingga, tidak perlu ada langkah yang dilakukan Amerika Serikat untuk menangkap mereka dengan alasan-alasan pencegahan agar kombatan tidak kembali ke medan perang.

Pasal 41-43 dan pasal 78 Konvensi Jenewa IV mengatur tentang *assigned residence* dan interniran. Namun, status anak-anak yang ditangkap oleh Amerika Serikat ini tidak sama dengan *assigned residence* atau interniran. Sehingga pasal ini tidak dapat diaplikasikan sebagai pasal yang memungkinkan *enemy combatant* untuk ditangkap di bawah hukum humaniter internasional.

Dalam kasus penangkapan anak-anak Afghanistan oleh Amerika Serikat sebagai *enemy combatant*, keadaan yang ada dan pasal-pasal yang mendasari diperbolehkannya penangkapan *enemy combatant* dalam Konvensi Jenewa IV adalah berbeda. Anak-anak tersebut tidak dapat ditangkap sebagai *enemy combatant*, karena keberadaan mereka sendiri bukanlah ancaman terhadap keamanan negara serta tidak ada bukti yang dapat memperlihatkan bahwa anak-anak tersebut akan membuat kombatan untuk kembali ke medan perang.

Terkait dengan penangkapan anak-anak di tengah konflik bersenjata dengan alasan keamanan, terdapat sebuah istilah yang sering didengar di dunia internasional yaitu *administrative detention*. Walaupun belum ada definisi dan pengaturan yang sah di bawah hukum internasional mengenai *administrative detention*, *administrative detention* mengacu pada suatu situasi di mana seorang anak dirampas kebebasannya di bawah kuasa atau perintah suatu cabang eksekutif dari pemerintah. Penjelasan yang berlaku

umum tentang *administrative detention* menjelaskan bahwa suatu penahanan dianggap sebagai *administrative detention* jika, secara *de jure* dan/atau *de facto*, telah diperintahkan oleh eksekutif dan kekuatan keputusannya merupakan tanggung jawab otoritas administratif atau kementerian, bahkan jika nantinya ada suatu upaya hukum pengadilan terhadap keputusan tersebut.⁸

Salah satu jenis penahanan dalam *administrative detention* adalah penahanan atas alasan keamanan. Penahanan ini termasuk penahanan anak-anak yang sedang berada di tengah konflik bersenjata baik sebagai pihak yang turut serta dalam permusuhan maupun tidak. *Administrative detention* juga melakukan penahan terhadap anak-anak yang dianggap sebagai *enemy combatant*. *Administrative detention* ini juga melakukan penahanan terhadap anak dengan alasan untuk mencegah suatu tindak kejahatan agar tidak terjadi.

Jenis *administrative detention* atas alasan keamanan ini mirip dengan penangkapan anak Afghanistan oleh Amerika Serikat. Alasannya adalah untuk mencegah kombatan agar tidak kembali ke medan perang. Alasan tersebut merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kembalinya kombatan ke medan perang dan kembali melakukan perlawanan, tidak terjadi. Namun kemudian pertanyaan yang muncul adalah apakah penangkapan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap anak-anak Afghanistan dapat disebut sebagai *administrative detention*.

Salah satu syarat diperbolehkannya dilakukan *administrative detention* adalah penahanan tersebut harus sah atau legal menurut hukum. Kemudian, penahanan tersebut harus diizinkan oleh hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Dalam kasus ini, tidak diketahui apakah Afghanistan atau Amerika Serikat memperbolehkan adanya penahanan ini. Namun, diketahui sejak tahun 2002, pemerintah Amerika Serikat telah melakukan penahanan dalam bentuk *administrative detention* terhadap kurang lebih 90 anak-anak di pangkalan udara Bagram. Anak-anak tersebut ditangkap sebagai *unlawful enemy combatant*. Kasus ini sama dengan kasus anak-anak yang ditangkap Amerika Serikat sejak tahun 2008. Bahkan dapat diduga bahwa kasus ini adalah kelanjutan kasus penangkapan 90 anak Afghanistan sejak tahun 2009.

Penangkapan anak-anak Afghanistan tersebut merupakan bentuk *administrative detention* atas alasan keamanan. Pada ketentuan hukum humaniter internasional, *administrative detention* ini dapat disamakan dengan interniran yang telah diatur dalam Konvensi

⁸ Hamilton, Carolyn, *Administrative Detention of Children: A Global Report*, Children's Legal Centre, University of Essex, 2011, hlm. 2. Diambil dari Louis Joinet, Rapporteur of the Sub-Commission on the Fight against Discriminatory Measures and Protection of Minorities, Report on the Practice of Administrative Detention, U.N. Doc. E/CN.4/sub.2/1989/27, para. 17.

Jenewa IV. Suatu negara dapat melakukan penahanan secara administratif terhadap anak (*internment*) tetapi pihak yang berkuasa harus memiliki alasan yang tepat. Menurut Commentary Konvensi Jenewa IV, pasal 42 mengizinkan negara untuk menginternir seseorang hanya jika ada alasan serius yang sah untuk berpikir bahwa mereka adalah anggota dari organisasi-organisasi yang bertujuan untuk menyebabkan gangguan, atau bahwa mereka mungkin serius akan merugikan keamanan dengan beberapa cara, antara lain, sabotase dan spionase. Dalam rangka untuk membenarkan penahanan warga sipil, negara harus memiliki alasan yang baik untuk berpikir bahwa orang yang bersangkutan, karena hal-hal yang dilakukan, pengetahuan atau kualifikasinya, merupakan ancaman nyata terhadap keamanan pada saat ini atau masa depan.

Kembali pada hal yang telah diuraikan sebelumnya, anak-anak yang ditangkap oleh Amerika Serikat tidak dapat digolongkan sebagai interniran. Meskipun penangkapan penduduk sipil sebagai interniran diperbolehkan dengan alasan-alasan yang baik, namun, Amerika Serikat tidak memiliki alasan yang nyata yang dapat membenarkan penangkapan terhadap anak-anak Afghanistan.

Suatu masalah kembali muncul terhadap ketentuan pada Konvensi Jenewa tentang penangkapan penduduk sipil sebagai interniran dengan alasan yang baik dan kuat, apakah dasar dari alasan yang baik dan kuat yang dapat membuat penahanan terhadap penduduk sipil dapat dibenarkan? Hal tersebut belum diatur dan belum dijelaskan dalam hukum humaniter internasional.

Penangkapan anak-anak Afghanistan ini tidak dapat dikatakan sebagai *administrative detention* dan penangkapan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional. Alasannya, walaupun beberapa pasal telah memberikan izinnya untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil, namun tolak ukur penentuan alasan yang tepat sebagai penangkapan itu belum ada. Untuk menentukan tolak ukur itu dapat dikatakan adalah hal yang tidak gampang. Namun, hal itu sangat diperlukan. Karena akan sangat tidak adil untuk anak-anak yang tidak berdosa yang ditangkap hanya karena mereka diduga akan menjadi suatu ancaman di kemudian hari.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak-anak Afghanistan yang ditangkap Amerika Serikat dalam Hukum Humaniter Internasional

Penangkapan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap lebih dari 200 anak-anak Afghanistan sebagai *enemy combatant* bertentangan dengan hukum humaniter

internasional. Anak-anak sebagai bagian dari penduduk sipil, tidak seharusnya menjadi sasaran anggota militer, ditangkap, dan dipenjarakan di penjara militer.

Walaupun penangkapan anak-anak Afghanistan oleh Amerika Serikat sebagai *enemy combatant* tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional, bukan berarti bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlindungan di bawah hukum humaniter internasional. Anak-anak itu tetap berstatus sebagai penduduk sipil dan segala sesuatu yang terjadi terhadap mereka, selama mereka berada di tengah konflik bersenjata, akan diatur dan dilindungi di bawah Konvensi Jenewa IV. Protokol Tambahan I dan II juga memberikan perlindungan terhadap mereka.

Di bawah ini adalah bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak-anak Afghanistan yang ditangkap oleh Amerika Serikat sebagai *enemy combatant*.

a. Anak-anak harus diperlakukan secara manusiawi.

Pasal 3 Konvensi Jenewa berisi, antara lain, non-kombatan, termasuk penduduk sipil harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria lain yang serupa. Pasal 37 poin a CRC juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar diperlakukan secara manusiawi.

Anak-anak yang ditangkap dan ditahan oleh pihak Amerika Serikat sebagai *enemy combatant* harus tetap diberikan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 37 poin a tersebut. Anak-anak termasuk golongan penduduk sipil dan walaupun mereka ditahan mereka harus tetap diperlakukan sebagaimana penduduk sipil seharusnya diperlakukan.

b. Anak-anak harus diperlakukan secara khusus.

Pasal 76 Konvensi Jenewa IV memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil yang ditangkap dan ditahan oleh pihak lawan. Pasal tersebut berbunyi:

“Protected persons accused of offences shall be detained in the occupied country, and if convicted they shall serve their sentences therein. They shall, if possible, be separated from other detainees and shall enjoy conditions of food and hygiene which will be sufficient to keep them in good health, and which will be at least equal to those obtaining in prisons in the occupied country. They shall receive the medical attention required by their state of health.

They shall also have the right to receive any spiritual assistance which they may require.

Women shall be confined in separate quarters and shall be under the direct supervision of women.

Proper regard shall be paid to the special treatment due to minors.

Protected persons who are detained shall have the right to be visited by delegates of the Protecting Power and of the International Committee of the Red Cross, in accordance with the provisions of Article 143. Such persons shall have the right to receive at least one relief parcel monthly."

Dalam paragraf 5 pasal tersebut dijelaskan bahwa anak-anak di bawah umur harus diberikan perlakuan yang khusus. Anak-anak di bawah umur tidak bisa diberikan perlakuan seperti halnya orang dewasa yang menjadi tahanan.

Anak-anak Afghanistan yang ditahan di dalam penjara militer oleh Amerika Serikat ini harus tetap mendapatkan perlindungan selayaknya penduduk sipil. Mereka harus diperlakukan dengan khusus karena anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan dari delegasi *International Committee of the Red Cross* atau ICRC.

Kunjungan yang dilakukan delegasi ICRC tersebut merupakan kegiatan humaniter yang sangat penting. Delegasi ICRC akan memastikan apakah pihak yang ditahan, dalam kasus ini adalah anak-anak, mendapatkan perlakuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Delegasi tersebut juga memiliki tugas untuk memastikan apakah anak-anak yang ditahan tetap mendapatkan hak-haknya dan memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi Jenewa tetap dilakukan.

Amerika Serikat telah melakukan kewajibannya dengan baik. Amerika Serikat telah memberikan akses terhadap delegasi ICRC untuk masuk dan mengunjungi tempat penahanan anak-anak Afghanistan tersebut di Afghanistan. Delegasi ICRC tersebut juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka membantu dan memfasilitasi para tahanan anak-anak untuk berhubungan dengan keluarganya menggunakan surat dan telepon. Delegasi ICRC juga memberikan bantuan terhadap keluarga tahanan untuk dapat memiliki akses masuk untuk mengunjungi anak atau kerabatnya di tempat mereka ditahan. Dalam kasus ini, *The Afghanistan Independent Human Rights Commission* juga memiliki akses untuk mengunjungi tempat penahanan anak-anak yang ditangkap.

UNICEF belum diberikan akses untuk mengunjungi tempat penahanan anak-anak yang ditangkap. Dalam laporan terhadap *UN's Committee on the Rights of the Child* yang ditulis Amerika Serikat atas isu yang menyangkut kasus penangkapan anak Afghanistan, Amerika Serikat tidak memberikan keterangan apakah UNICEF atau badan independen lain memiliki akses terhadap anak-anak yang ditangkap. Hanya

dikatakan bahwa ICRC, melalui delegasinya, dan *The Afghanistan Independent Human Rights Commission* lah yang sampai saat ini memiliki akses terhadap anak-anak yang ditangkap di tempat penahanan mereka.

UNICEF, sebagai lembaga PBB yang menangani masalah anak, seharusnya mendapatkan akses menuju anak-anak tersebut. Sehingga, mereka dapat memantau bagaimana kondisi anak-anak tersebut di dalam penjara militer tempat mereka ditahan. Sayangnya, Amerika Serikat tidak memberikan pernyataan terkait akses UNICEF terhadap anak-anak itu.

Selain itu Protokol Tambahan I juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang ditangkap sebagai *enemy combatant* oleh Amerika Serikat. Anak-anak adalah obyek yang harus diperlakukan dengan penghormatan dan diberikan perlindungan yang khusus. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang jatuh ke tangan musuh, walaupun mereka bukanlah tawanan perang, tetap mendapatkan perlindungan dan hak-hak sesuai dengan ketentuan pasal ini. Hal ini berarti, anak-anak yang ditangkap sebagai *enemy combatant* ini masih dilindungi secara penuh oleh ketentuan dalam Protokol Tambahan I ini tanpa terkecuali.

c. Anak-anak harus mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 37 huruf b CRC menyatakan, bahwa sesungguhnya tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek. Penangkapan mereka pun tidak dibenarkan oleh hukum humaniter internasional. Seharusnya, anak-anak tersebut mendapatkan bantuan hukum agar dapat menyampaikan keluh kesahnya dan diupayakan untuk dikeluarkan dari penjara tempat mereka ditahan.

CRC menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya, hal ini juga termasuk penangkapan anak-anak Afghanistan oleh Amerika Serikat sebagai *enemy combatant*, berhak untuk meminta akses ke hukum dan bantuan lainnya. Anak-anak tersebut juga memiliki hak untuk mempertanyakan legalitas perampasan kebebasannya sebelum pengadilan.

Amerika Serikat menyatakan, bahwa bantuan hukum tidak diberikan kepada anak-anak yang ditahan tersebut karena sifat penahanan mereka bukanlah karena mereka telah melakukan suatu kejahatan melainkan untuk mencegah kembalinya kombatan ke medan perang. Dengan kata lain sifat penahanan mereka adalah

preventif. Namun, Amerika Serikat menyatakan, bahwa ada banyak proses yang dapat memastikan jika anak-anak tersebut ditahan secara sah dan hanya akan ditahan selama waktu yang diperlukan, termasuk sidang administrasi periodik yang memungkinkan tahanan untuk menantang penahanannya. Pada penjara tempat anak-anak tersebut ditahan, tahanan berhak untuk menghadiri bagian tersebut, bersaksi, memanggil saksi-saksi, memberikan pertanyaan terhadap pemerintah, dan informasi dokumenter. Dalam hal ini, anak-anak tersebut akan didampingi dengan wakil pribadi yang melakukan advokasi atas nama anak-anak tersebut.

Walaupun begitu, penangkapan anak-anak Afghanistan tersebut tidak seharusnya dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional. Seharusnya tetap ada bantuan hukum, baik itu dari Afghanistan maupun dari organisasi independent, yang memberikan bantuan hukum terhadap anak-anak tersebut agar mereka segera dibebaskan dan mendapatkan kembali hak-haknya.

d. Anak-anak harus mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka.

Hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak dilindungi oleh CRC. Hak-hak yang dimiliki oleh anak, antara lain hak untuk hidup, hak agar nama dan kebangsaannya dicatat secara sah, hak untuk mengetahui orang tua mereka dan dilindungi oleh mereka, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain dan beraktivitas di waktu luang mereka, dan lain-lain.

Walaupun anak-anak sedang ditangkap dan ditahan oleh suatu pihak, hal tersebut bukan berarti bahwa anak-anak tersebut dapat kehilangan hak-hak mereka. Hal tersebut juga berlaku terhadap anak-anak Afghanistan. Mereka tetap memiliki hak untuk menjalani dan menikmati hak-hak mereka. Amerika Serikat, sebagai pihak yang menangkap mereka, juga memiliki kewajiban untuk tetap memberikan akses pada anak-anak tersebut untuk melakukan hak-hak nya.

Penangkapan anak-anak Afghanistan oleh Amerika Serikat merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Penangkapan tersebut juga termasuk kegiatan yang merebut kebebasan anak. Perlindungan terhadap mereka harus tetap diberikan baik dalam sisi hukum humaniter internasional maupun hak asasi manusia. Karena anak-anak tersebut adalah penduduk sipil dan penduduk sipil harus dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Mereka juga merupakan generasi penerus bangsa dan mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penangkapan lebih dari 200 anak Afghanistan oleh Amerika Serikat sebagai enemy combatant tidak dibenarkan oleh hukum humaniter internasional. Penangkapan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional, yang meliputi:
 - 1) Status enemy combatant tidak diatur dalam hukum humaniter internasional. Enemy combatant bukan termasuk kombatan atau unlawful combatant.
 - 2) Anak-anak tersebut adalah penduduk sipil dan penangkapan terhadap penduduk sipil tidak dibenarkan dalam hukum humaniter internasional.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan hukum humaniter internasional terhadap anak-anak yang ditangkap Amerika Serikat sudah diberikan oleh hukum humaniter internasional. Amerika Serikat juga telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut sesuai hukum yang berlaku walaupun belum ada bantuan hukum yang diberikan kepada mereka. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak-anak tersebut antara lain:
 - 1) Anak-anak harus diperlakukan secara manusiawi.
 - 2) Anak-anak harus diperlakukan secara khusus.
 - 3) Anak-anak harus mendapatkan bantuan hukum.
 - 4) Anak-anak harus mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka.

2. Saran

- a. Istilah enemy combatant sebaiknya segera diatur dan diberi status yang jelas dalam hukum humaniter internasional. Hal ini akan membantu menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan enemy combatant di dunia internasional.
- b. Beberapa ketentuan di Konvensi Jenewa IV memungkinkan adanya penangkapan penduduk sipil yang diduga melakukan suatu hal yang dapat mengancam keamanan. Penduduk sipil tersebut dapat ditangkap dan ditahan jika ada alasan yang kuat. Dalam hal ini tolak ukur untuk menentukan alasan yang dapat digunakan untuk menangkap penduduk sipil sangatlah penting. Apabila tidak ada tolak ukur untuk menentukan bahwa seseorang benar-benar mengancam keamanan suatu negara, maka akan terjadi kesewenang-wenangan suatu pihak dalam melakukan penangkapan terhadap penduduk sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rahman, Musthafa, **Afghanistan di Tengah Arus Perubahan-Laporan dari Lapangan**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Aswidah, Roichatul, **Hak Asasi Manusia Solusi Menghadapi Fundamentalisme- Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia: Hak Asasi Manusia dan Fundamentalisme Vol. VII No. 2**, ELSAM, Jakarta, 2011.
- Ibrahim, Johnny, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Kusumaatmadja, Mochtar, **Konvensi-konvensi Palang Merah th. 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang**, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979.
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.
- Permanasari, Arlina, **Pengantar Hukum Humaniter**, ICRC, Jakarta, 1999.
- Pictet, Jean S. (editor), *Commentary of Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1958.
- Smith, Rhona K.M., dkk., **Hukum Hak Asasi Manusia**, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Starke, J.G., **Pengantar Hukum Internasional 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Balendra, Natasha, 2008, *Defining Armed Conflict* (online), Cardozo Law Review Volume 29, <http://cardozolawreview.com/Joomla1.5/content/29-6/BALENDRA.29.6.pdf>. (14 Oktober 2013).
- Dörmann, Knut, *The Legal Situation of "Unlawful/ Unprivileged Combatants"*, International Review of the Red Cross No. 849, 2003.
- Hamilton, Carolyn, *Administrative Detention of Children: A Global Report*, Children's Legal Centre, University of Essex, 2011.
- Harvey, Katherine, 2003, *Afghanistan, The United States, and the Legacy of Afghanistan's Civil War* (online), <http://www.stanford.edu/class/e297a/Afghanistan,theUnitedStates.htm>. (10 Januari 2014).

Lurie, Jim Lurie dan Torill Tjelflaa, *Children's Rights and the UN Convention on the Rights of the Child: Monitoring and Implementation in Norway*, Dialogue in Praxis, <http://www.dialogueinpraxis.net/index.php?id=5&a=article&aid=12>. (30 Oktober 2013)

Mrázek, Josef, 2010, *Armed Conflict and the Use of Force (online)*, Czech Yearbook of International Law (Vol. 1), <http://www.cyil.eu/contents/>, (14 Oktober 2013).

O'Donnell, Dan, *Child Protection A Handbook for Parliamentarians*, Inter-Parliamentary Union dan UNICEF, Switzerland, 2004.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Susanto, Fransiska, **Penerapan prinsip Responsible to Protect dalam Negara yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat (Study Kasus Demonstrasi Anti Pemerintahan Suriah pada Maret 2011- Maret 2012)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Internet

Arlina, **Apa Arti "Konflik Bersenjata?"** (online), 2008, <http://arlina100.wordpress.com/2008/12/22/apa-arti-konflik-bersenjata/>, diakses 14 Oktober 2013.

International Law: The Existence of "Enemy Combatants", <http://ubethecritic.com/2010/07/international-law-the-existence-of-enemy-combatants/>, diakses pada 14 Oktober 2013.

The relevance of IHL in the context of terrorism, <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/terrorism-ihl-210705.htm>, diakses pada 14 Oktober 2013.